

---

**KAJIAN KETERPADUAN KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR  
DI KELURAHAN MANGUNHARJO, KOTA SEMARANG**

**Fransisca Situmorang<sup>1</sup> dan Wiwandari Handayani<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

Email : [fransiscakakashi@gmail.com](mailto:fransiscakakashi@gmail.com)

**Abstrak:** Kelurahan Mangunharjo secara administrasi berada di Kecamatan Tugu dan merupakan salah satu kawasan pesisir di Kota Semarang. Terdapat banyak masalah lingkungan pesisir di Kelurahan Mangunharjo, seperti penurunan kualitas lingkungan, abrasi pantai, banjir dan juga rob. Permasalahan lingkungan tersebut disebabkan oleh dua faktor yaitu alam dan akibat aktivitas manusia. Bahkan untuk tingkat abrasi pantai terparah di Kecamatan Tugu dialami oleh Kelurahan Mangunharjo (DKP Kota Semarang, 2010). Banyak kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir telah dilakukan dan melibatkan banyak pihak/stakeholder di Mangunharjo, namun belum diketahui keterpaduan dari setiap stakeholder yang terlibat. Oleh karena itu, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini ialah untuk mengkaji keterpaduan kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir yang dilakukan berbagai stakeholder dalam perwujudan lingkungan yang berkelanjutan di Kelurahan Mangunharjo. Untuk metode penelitiannya menggunakan metode campuran yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode pendekatan kuantitatif menggunakan analisis pembobotan dengan teknik sampelnya yaitu sampel acak stratifikasi tidak proporsional (*disproportional stratified random sampling*, stakeholder dibagi ke dalam empat stratum yakni pemerintah, non pemerintahan, akademisi dan masyarakat (kelompok kerja). Metode pendekatan kualitatif menggunakan sampel purposif (*purposive sampling*) yang disesuaikan dengan kelompok stakeholder yang telah dibagi.

Berdasarkan hasil analisis pembobotan (pendekatan kuantitatif), diketahui telah terdapat keterpaduan dengan kategori rata-rata adalah **baik** dalam setiap variabel *fragmented approach*, komunikasi, koordinasi, harmonisasi dan integrasi (kondisi internal). Keterpaduan tersebut diwadahi oleh organisasi baru yaitu Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang (KKMKS). Namun diluar wadah tersebut (kondisi eksternal) ditemukan kurangnya keterpaduan karena terbentuk kelompok-kelompok kerja sama dalam pelaksanaan kegiatannya. Ketidaksinkronan kondisi internal dan eksternal ini disebabkan oleh tidak tersedianya sistem dan program kerja yang terintegrasi di dalam KKMKS terkait dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga setiap stakeholder tidak berperan sesuai dengan peran stakeholder yang seharusnya.

**Kata kunci :** kawasan pesisir, kegiatan pengelolaan, keterpaduan, peran stakeholder

**Abstract:** Mangunharjo Village administratively located in the Tugu Subdistrict and is one of the coastal area in Semarang city. There are so many problems that related about coastal environment near the village, such as environment degradation, abrasion, flood and also rob. Those kind of environment problems caused by two basic factors, nature and human habit. Even for the level of abrasion in the Tugu subdistrict suffered by Mangunharjo village (DKP of Semarang, 2010). There are so many coastal environment management had been done and involving many stakeholders and participator.in Mangunharjo, but it's still can't unveil the integration from each involved stakeholder. Therefore, the aim for this research is to asses the integration of coastal environment management which have been done by stakeholder to make a realization in Mangunharjo Village. Research method that has been done in this research using the mix method from quantitative approachment and qualitative. Quantitative method is using the weighted anaylsis with sample technique using the *disproportional stratified random sampling* with sharing stakeholder to four groups, such as government, non government organizations (NGOs), academics and society. Qualitative approachment

*method is using purposive sampling which summarize and adjusted with stakeholder group that has been divided.*

*Based on the weighing analysis, it's known that there are integration with the value is good in each variable fragmented approach, coordination, communication, harmony and integration. That integration contained by new organization, such as Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang (KKMKS) but outside that, there are some lack of integration because of those stakeholders divided into some clusters. The unavailability of the system and integrated work program in the KKMKS involved in the implementation of its activities so that every stakeholder does not act in accordance with the role of stakeholders should be.*

**Keywords:** *coastal areas, management activities, integration, role of stakeholders*

## PENDAHULUAN

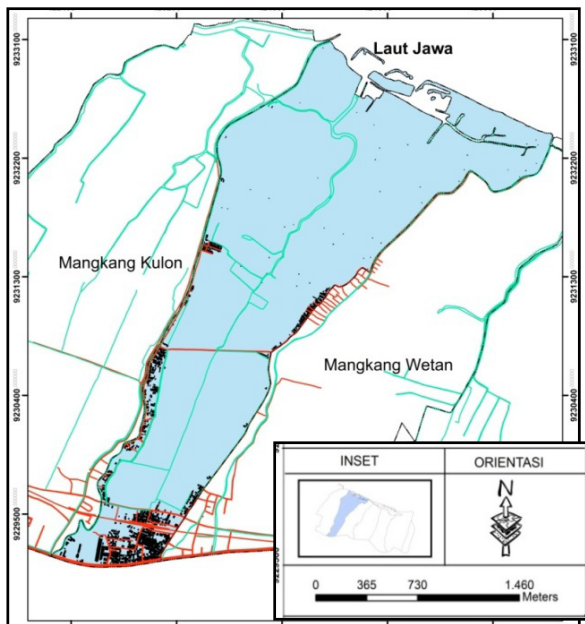
Salah satu masalah utama yang terjadi dalam pengembangan sumber daya wilayah pesisir khususnya di Indonesia sehingga tidak berjalan secara optimal dan berkelanjutan ialah kurang sinergitasnya kerjasama antarstakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir dan lautan (Dahuri *et.al.*, 1996). Pembangunan sumber daya pesisir kemudian hanya dikembangkan berdasarkan kepentingan sektoral tanpa mempertimbangkan aspek berkelanjutan khususnya keberlanjutan di bidang ekologi (lingkungan). Setiap pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem dengan skala tertentu. Pemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan prinsip-prinsip ekologi dapat menurunkan mutu atau kualitas lingkungan dan nantinya akan berlanjut dengan kerusakan wilayah ekosistem di kawasan sekitar yang bersangkutan.

Kota Semarang merupakan bagian wilayah administrasi Jawa Tengah yang memiliki wilayah pesisir di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Tugu, Semarang Utara, Semarang Barat, Genuk, Semarang Timur dan Gayamsari. Kondisi wilayah pesisir yang tergolong kritis di Kota Semarang ialah Pantai Semarang Barat dan Kecamatan Tugu tepatnya di Kelurahan Mangunharjo dan Mangkang Wetan yang menghadap atau berbatasan langsung dengan Laut Jawa.

Tingkat kerusakan parah yang terjadi di Mangunharjo disebabkan karena adanya abrasi yang merusak tambak dan juga tempat tinggal penduduk setempat. Posisi secara geografis inilah yang mengakibatkan Kelurahan Mangunharjo yang berada di Kecamatan Tugu mengalami tingkat abrasi

yang parah. Kerusakan tambak akibat abrasi yang dialami petani tambak Mangunharjo seluas 96,17 ha yang dipicu oleh pencemaran limbah pabrik yang ada di sepanjang Pantura Semarang. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di kelurahan ini berprofesi sebagai nelayan sehingga perlu pemberdayaan sosial maupun ekonomi dalam menanggapi kebijakan-kebijakan pembangunan. Abrasi adalah suatu perubahan bentuk pantai yang disebabkan ketidakseimbangan interaksi dinamis pantai baik akibat faktor alam maupun non alam (aktivitas manusia). Peran serta atau partisipasi masyarakat nelayan ini sangat mempengaruhi tingkat keberlanjutan lingkungan di sekitarnya.

Kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan khususnya penanaman mangrove yang dilakukan di Kelurahan Mangunharjo sudah sangat sering dilakukan. Pihak atau stakeholder yang mengadakan kegiatan tersebut juga bervariasi. Terdiri dari pihak pemerintah baik provinsi Jawa Tengah maupun Kota Semarang, swasta, komunitas atau kelompok kerja pecinta lingkungan dan juga masyarakat. Kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan di Mangunharjo belum diketahui bentuk keterlibatan dari masing-masing kelompok, manajemen pengelolaannya dan sistem pengelolaan yang dilakukan. Batasan wilayah studi Kelurahan Mangunharjo ditunjukkan oleh **GAMBAR 1**.



Sumber : BAPPEDA Kota Semarang, 2010

**GAMBAR 1**  
**PETA ADMINISTRASI KELURAHAN**  
**MANGUNHARJO**

## KAJIAN LITERATUR

### *Pengelolaan Lingkungan Pesisir*

Dalam UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Pasal 1 ayat (2), disebutkan bahwa :

*“Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut”.*

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Per.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pasal 1 ayat (3) mengtaakan bahwa:

*“Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat”.*

### *Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu*

Pengertian ICM atau Pengelolaan Pesisir Terpadu (PPT) berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10 Tahun

2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu merupakan pendekatan yang memberikan arah bagi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan berbagai perencanaan sektoral, berbagai tingkat pemerintahan, ekosistem darat dan laut, serta sains dan manajemen. Tujuan utama dari pengelolaan pesisir terpadu adalah untuk pemanfaatan sumberdaya pesisir dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pelaksanaan pembangunan nasional, dengan tidak mengorbankan kelestarian sumberdaya pesisir di dalam memenuhi kebutuhan baik untuk generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang. Setiap pemanfaatan harus dilakukan dengan hati-hati (*precaunary principles*), sambil mengantisipasi dampak negatifnya karena ketidakmampuan manusia mengantisipasi dampak lingkungan di pesisir akibat berbagai aktivitas. Selain itu, melalui PPT tersebut diharapkan mampu mengatasi permasalahan pembangunan pesisir yang sedang berlangsung saat ini dan juga di masa yang akan datang, serta memberdayakan masyarakat wilayah pesisir agar dapat menikmati keuntungan yang diperoleh secara berkesinambungan. Karakteristik utama dalam PPT adalah mengintegrasikan elemen-elemen pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) yang terpisah menjadi suatu sistem yang terpadu dan serasi.

### *Peran Stakeholder dalam Pengelolaan Pesisir secara Terpadu*

Berdasarkan aktivitasnya, masyarakat di kawasan pesisir biasanya memanfaatkan jasa-jasa lingkungan (*enviromental services*) yang ada untuk memenuhi tingkat kebutuhan hidupnya. Melalui pemanfaatan jasa-jasa lingkungan yang ada di kawasan lingkungannya, masyarakat pesisir berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Tidak berbeda jauh dengan masyarakat, pihak swasta dan pemerintah juga berusaha memanfaatkan sumber daya milik bersama (*common resources*) tersebut dan terkadang hanya menguntungkan di suatu aspek tertentu tanpa mempertimbangkan aspek atau dimensi-dimensi lain yang ada di lingkungan pesisir.

**TABEL 1**  
**PERAN STAKEHOLDER DALAM**  
**INTEGRATED COASTAL MANAGEMENT (ICM)**

Stakeholder	Peran/Tugas
Organisasi di luar pemerintah/ <i>Non-governmental Organizations</i> (NGOs), mis: kelompok agama, NGOs yang berkaitan dengan lingkungan skala nasional maupun internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengorganisasikan masyarakat karena anggotanya biasanya berasal dari masyarakat itu sendiri</li> <li>• Bekerja dengan masyarakat untuk mengetahui prioritas utama dan kebutuhan mereka</li> <li>• Menyediakan timbal balik (<i>feedback</i>) ke pihak pemerintah</li> <li>• Transfer ilmu pengetahuan ke masyarakat</li> <li>• Monitoring dan manajemen sumber daya yang tersedia di kawasan pesisir</li> <li>• Bertindak sebagai advokasi publik</li> </ul>
Universitas, institusi sains dan kesatuan pendidikan lainnya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan data dan informasi untuk membuat manajemen keputusan penginformasian</li> <li>• Membuat pendidikan khusus dan mengadakan pelatihan program pada semua tingkatan usia</li> <li>• Menyediakan dasar dari pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan</li> </ul>
Pemilik lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghindari bencana, erosi dan banjir</li> <li>• Memastikan untuk tetap memelihara lahan dan habitatnya</li> </ul>
Bisnis yang berada disekitar kawasan pesisir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyediakan modal, fasilitas dan alat untuk pembangunan proyek kegiatan.</li> </ul>

Sumber : [www.gdrc.org](http://www.gdrc.org), 2013

### **Indikator Pengelolaan Kawasan Pesisir secara Terpadu**

Menurut Cicin-Sain (1993) dalam Kay & Alder (1999), diketahui bahwa dalam manajemen pengelolaan pesisir terdapat lima rangkaian kesatuan yang menunjukkan rendah kuatnya integrasi antar stakeholder, yaitu:

- Fragmented approach*, yaitu pendekatan pembagian -- menghadirkan unit - unit bebas dengan sedikit komunikasi diantara unit-unit tersebut;
- Communication*, yaitu komunikasi -- adanya pertemuan antara unit-unit

bebas tersebut dalam suatu forum dalam jangka waktu tertentu;

- Coordination*, yaitu koordinasi -- beberapa unit bebas tersebut melakukan beberapa tindakan dan kemudian menyesuaikannya dengan program kerja mereka;
- Harmonization*, yaitu keharmonisan -- unit-unit bebas mengambil suatu tindakan sesuai dengan program kerja mereka, secara jelas dan tegas diarahkan dengan arahan serta kebijakan tujuan. Arahan tersebut mempunyai tingkat kedudukan atau level yang paling tinggi;
- Integration approach*, yaitu pencapaian integrasi atau keterpaduan -- terdiri lebih banyak mekanisme yang sifatnya formal dalam menyesuaikan pekerjaan dari berbagai unit yang pada akhirnya tidak lagi berdiri secara bebas melainkan harus bertanggung jawab terhadap arahan dan kebijakan tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya melibatkan pembentukan organisasi baru akibat adanya peleburan unit yang dulunya adalah bebas.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sehingga data yang didapatkan berasal dari kuesioner serta wawancara dan deskriptif melalui data-data kegiatan juga literatur. Teknik analisis yang digunakan ialah deskriptif kuantitatif, statistik deskriptif, dan analisis pembobotan. Analisis pembobotan yaitu dengan memberikan nilai kepada variabel-variabel yang telah disusun indikator-indikatornya dalam menentukan keterpaduan kegiatan yang dilakukan masing-masing stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup. Lebih jelasnya dapat melihat tabel berikut:

**TABEL 2**  
**PENYESUAIAN INDIKATOR KE MASING-MASING**  
**VARIABEL KETERPADUAN**

Indikator	Variabel
1. Ada kegiatan yang dilakukan	<i>Fragmented Approach</i>
2. Ada penyampaian informasi	
1. Kualitas penyampaian	<i>Communication</i>
2. Tingkat kejelasan	
3. Tingkat kualitas konsistensi	
4. Jumlah Media yang digunakan	
5. Tingkat Pemahaman informasi	
6. Respon yang diharapkan	
1. Kualitas Jadwal Pertemuan	<i>Coordination</i>

Indikator	Variabel
2. Ada sinkronisasi tujuan 3. Terstruktur 4. Dapat dihitung ( <i>countable</i> )/ dilihat hasilnya	
1. Keberadaan arahan dan kebijakan 2. Penyesuaian terhadap program kerja 3. Tingkat kualitas efektivitas arahan dan kebijakan 4. Prosedur monitoring dan evaluasi	<i>Harmonization</i>
1. Ada organisasi baru 2. Penyesuaian pembagian bidang kerja 3. Tingkat kualitas kejelasan dan kedetailan kegiatan 4. Terdapat Prosedur koordinasi 5. Kesepakatan kebijakan dan tujuan	<i>Integrated Approach</i>

Sumber: Analisis Penyusun, 2013

## HASIL PEMBAHASAN

### Analisis Permasalahan Lingkungan

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan lingkungan di Kelurahan Mangunharjo yang dibedakan atas faktor alam dan manusia. Berdasarkan permasalahan lingkungan tersebut, diketahui bentuk penanganan yang telah dan seharusnya dilakukan sehingga dapat dijadikan sebagai rekomendasi.

**TABEL 3**  
**PERMASALAHAN LINGKUNGAN DAN**  
**PENANGANAN YANG DILAKUKAN**

No	Permasalahan	Dampak yang Ditimbulkan	Bentuk Penanganan
1	Abrasi pantai	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Hilangnya tambak-tambak masyarakat</li> <li>➤ Peralihan mata pencaharian petani ta mbak menjadi petani dan pengelola mangrove</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan Sabuk Pantai</li> <li>• Penanaman Hutan Bakau berupa Mangrove</li> </ul>
2	Penurunan Muka Tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Rob</li> <li>➤ Tergenangnya wilayah Mangunharjo</li> </ul>	Belum ada dilaksanakan di Mangunharjo
3	Banjir dan Rob	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penurunan kualitas infrastrukturnya jalan khususnya jalan</li> <li>➤ Rob menggerus tambak</li> <li>➤ Rusaknya jalan mengakibatkan terganggunya mobilitas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan tanggul berupa karung pasir di Sungai Kali Beringin</li> </ul>

Sumber : Analisis Penyusun, 2013

### Analisis Kegiatan Serta Stakeholder Terlibat

Dalam menangani permasalahan lingkungan yang ada di Mangunharjo, telah dilakukan banyak kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir dan melibatkan banyak pihak seperti pemerintah, non pemerintah, akademisi dan masyarakat (kelompok kerja).

Kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan di Mangunharjo saat ini terdiri atas beberapa kegiatan, antara lain yaitu penanaman dan pengelolaan mangrove, pembuatan sabuk pantai dan penyediaan bank sampah. Khusus dalam penyediaan tempat sampah oleh BLH Kota Semarang belum berjalan dengan optimal. Sehingga belum memiliki dampak saat ini karena kegiatan tersebut telah berhenti. Oleh karena itu, penelitian dibatasi hanya kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir di Kelurahan Mangunharjo terbatas pada penanaman dan pengelolaan mangrove dan pembuatan sabuk pantai.

Penanaman mangrove melibatkan banyak stakeholder dalam pelaksanaan kegiatannya. Biasanya sebelum mengadakan penanaman, kelompok pemerintahan dan akademisi biasanya terlebih dahulu mengadakan sosialisasi atau penyuluhan tentang kegiatan tersebut dan pentingnya kegiatan itu dilakukan. Dinas Pemerintahan yaitu DKP Kota Semarang semenjak tahun 2000 sudah mulai melakukan penanaman mangrove secara teratur di Mangunharjo. telah melibatkan banyak pihak diantaranya yakni, Kesemat (Universitas Diponegoro), Maga Bandi, DKP Provinsi Jateng, Universitas Negeri Semarang, dan juga LSM Bintari dan masyarakat Mangunharjo.

Pembuatan sabuk pantai yang dilakukan di Mangunharjo dilakukan sepehunya oleh pihak pemerintah (BLH Kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, DKP kota Semarang dan Provinsi Jawa Tengah) dibantu dengan LSM Biota Foundation.

### Analisis Persentase Keterlibatan Kelompok Kerja/Komunitas Lokal

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui besaran persentase kelompok kerja (Pokja) yang terlibat langsung dalam pengelolaan lingkungan pesisir di kelurahan Mangunharjo. Kelompok kerja yang terlibat secara aktif akan diketahui melalui program kegiatan yang telah ditentukan oleh kelompok tersebut. Kebutuhan data untuk analisis tersebut diperoleh melalui pembagian kuesioner ditambah dengan wawancara sebagai pendukung informasi yang dibutuhkan serta analisis dokumen kerangka kerja kelompok kerja tersebut.

Data kependudukan berupa jumlah penduduk usia produktif (15-69 tahun) yang diperoleh akan dibandingkan dengan jumlah masyarakat anggota Kelompok Kerja yang ada. Besar kecilnya persentase keterlibatan tersebut menentukan tinggi rendahnya partisipasi masyarakat untuk terlibat atau

berperan serta dalam pengelolaan lingkungannya.

$$\begin{aligned} \text{besar persentase} &= \frac{\sum \text{masyarakat yg terlibat dalam pokja}}{\sum \text{total masyarakat umur produktif}} \times 100\% \\ &= \frac{150}{2752} \times 100\% \\ &= 6\% \text{ (hasil pembulatan)} \end{aligned}$$

Persentase keterlibatan masyarakat masih kecil namun sangat berpotensi sebagai sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan pesisir.

#### Analisis Peran dan Bentuk Keterlibatan Stakeholder

Analisis ini digunakan untuk mengetahui peran yang telah dilakukan oleh masing-masing stakeholder sudah sesuai dengan yang seharusnya atau belum. Perbandingan antara peran yang seharusnya dan yang telah dilakukan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir di Mangunharjo dijelaskan sebagai berikut:

**TABEL 4**  
**PERBANDINGAN PERAN STAKEHOLDER DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR DI KELURAHAN MANGUNHARJO**

Stakeholder	Peran yang Seharusnya	Peran yang Telah Dilakukan
Pemerintah	Menyatukan segala sumber daya yang ada baik yang dimiliki oleh pihak swasta mau pun masyarakat	<b>Telah dilakukan</b> , namun belum secara kontinyu penyatuan yang dilakukan (khusus pada kegiatan-kegiatan tertentu)
	Penyedia kebijakan	<b>Telah dilakukan</b> , kebijakan yang ditentukan tidak bersifat transparan, hanya
	Memadukan kegiatan pada berbagai tingkatan yang ada	<b>Telah dilakukan</b> , melakukan kegiatan dalam tingkat nasional dan juga internasional di Mangunharjo (terdapat di Gambaran Umum)
	Mengatasi masalah di luar kewenangan masyarakat	<b>Telah dilakukan</b> , memberikan bantuan berupa bibit mangrove atau pun barang dalam mengelola hasil mangrove
Non Pemerintah - LSM	Mengorganisasikan masyarakat karena anggotanya biasanya berasal dari masyarakat itu sendiri	<b>Telah dilakukan</b> , membentuk kelompok kerja yang berasal dari masyarakat, anggota LSM Biota Foundation menjadi ketua kelompok dalam kelompok kerja baru
	Bekerja dengan masyarakat untuk mengetahui prioritas utama dan kebutuhan mereka	<b>Telah dilakukan</b> , menjalin kerjasama dengan kelompok kerja masyarakat. Namun masalah yang diangkat biasanya bukan hanya masalah masyarakat karena adanya sifat untuk mencari keuntungan kelompok sendiri.
	Menyediakan timbal balik ( <i>feedback</i> ) ke pihak pemerintah	<b>Telah dilakukan</b> , melalui kerja sama dengan kelompok kerja dan mengajukan proposal kegiatan ke pihak pemerintah.
	Transfer ilmu pengetahuan ke masyarakat	<b>Telah dilakukan</b> , mentransfer pengetahuan terkait pengelolaan mangrove baik dalam penanaman maupun pemanfaatan hasil mangrove. Meskipun saat ini BIOTA hanya melakukan tranfer pengetahuan kepada masyarakat yang menjadi anggota kelompok kerja yang dinaunginya.
	Monitoring dan manajemen sumber	<b>Belum dilakukan</b> . Bentuk monitoring yang

Stakeholder	Peran yang Seharusnya	Peran yang Telah Dilakukan
	daya yang tersedia di kawasan pesisir	dilakukan tidak kelihatan.
	Bertindak sebagai advokasi publik	<b>Belum dilakukan</b> , bersifat mencari keuntungan kelompok.
- Swasta (CSR)	Menyediakan modal, fasilitas dan alat untuk pembangunan proyek kegiatan	<b>Telah dilakukan</b> , Meskipun belum berkelanjutan dalam memberikan bantuan, dengan cara memberi berupa barang seperti mesin pembuat tepung dan juga memberi bibit mangrove
	Memastikan pekerjaan untuk tetap mengurus ruang dan sumber daya pesisir/laut	<b>Belum dilakukan</b> . Saat ini tidak ada masyarakat Mangunharjo yang bekerja di bawah kontrol pihak swasta dalam mengurus ruang dan sumber daya pesisir/laut.
Akademisi (Universitas, institusi sains dan kesatuan pendidikan lainnya)	Menyediakan data dan informasi untuk membuat manajemen keputusan penginformasian	<b>Belum dilakukan</b> karena peran dari pihak akademisi (dosen) belum optimal, dosen terlibat dalam kerja sama namun jarang diundang dalam rapat koordinasi.
	Membuat pendidikan khusus dan mengadakan pelatihan program pada semua tingkatan usia	<b>Belum dilaksanakan</b> namun telah berperan dalam mengadakan kegiatan penyuluhan lingkungan hidup
	Meningkatkan kesadaran publik	<b>Telah dilakukan</b> , memberikan penyuluhan lingkungan terkait pentingnya pengelolaan mangrove, terutama bagi anak-anak SD.
	Menyediakan dasar dari pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan	<b>Belum dilakukan</b> . Berperan dalam pengajuan proposal kegiatan (kelompok mahasiswa) untuk melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan di Mangunharjo.
Masyarakat (Kelompok Kerja)/ Pemilik Lahan	Menghindari bencana, erosi dan banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Telah dilakukan</b>, ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman mangrove dan pembuatan sabuk pantai di Mangunharjo (bekerja sama).</li> <li>• <b>Belum dilakukan</b> karena masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan (tidak menjaga kualitas lingkungan).</li> </ul>
	Memastikan untuk tetap memelihara lahan dan habitatnya	<b>Telah dilakukan</b> , ikut bergabung dalam kelompok kerja penanaman dan pemanfaatan mangrove

Sumber: Analisis Penyusun dan Kajian Berbagai Sumber\*

Catatan: \* Diambil dari sumber terkait Peran pemerintah dalam manajemen kolaborasi menurut Wiyanto tentang Pemberdayaan Masyarakat Pasca Proyek, 2004 yang diacu dalam Bambang, 2006 dan juga bersumber dari www.gdrc.org (The Global Development Research Center)

Peran stakeholder yang melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir di Mangunharjo masih banyak yang belum dilakukan karena terdapat penyimpangan-penyimpangan dari fungsi stakeholder itu sendiri. Akibatnya, hasil yang diharapkan dari kegiatan tersebut masih belum bersifat optimal.

#### Analisis Keterpaduan Stakeholder

Keterpaduan stakeholder dinilai berdasarkan penilaian kategori terhadap:

##### **1. Fragmented Approach**

Sekitar 86,27% dari jumlah total responden sebanyak 51 orang menyatakan bahwa variabel *fragmented approach* termasuk dalam kategori **baik** sedangkan

9,80% menyatakan **sedang** dan sisanya yaitu 3,92% menyatakan kategorinya **buruk**. Pengkategorian tersebut sudah merupakan hasil nilai dari pengkalian antara bobot dan skor.

##### **2. Komunikasi**

Berdasarkan masing-masing indikator yang ada dalam variabel Komunikasi, diketahui bahwa secara total variabel ini masuk dalam kategori **baik**. Hal tersebut dibuktikan dengan jawaban responden yang telah diakumulatitkan, sebanyak 88,24% dari 51 responden menjawab indikator-indikatornya dalam kategori **baik**.

##### **3. Koordinasi**

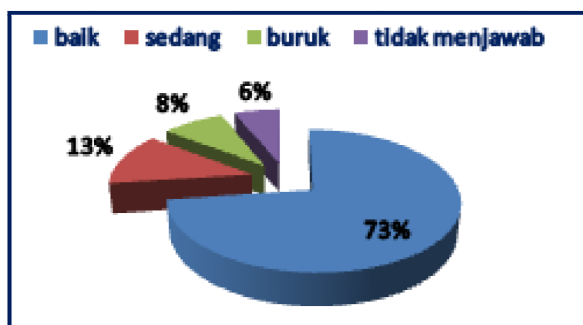
Pada variabel koordinasi, juga diperoleh bahwa kategorinya termasuk dalam kategori **baik** yang dibuktikan dengan jumlah persentasenya sebesar 84,32% masuk dalam kategori **baik**. Variabel ini terdapat indikator utama yaitu adanya kualitas jadwal pertemuan yang diadakan, terdapat adanya sinkronisasi tujuan yang akan dicapai secara bersama-sama dan dipatuhi oleh setiap stakeholder yang terlibat, program kerja yang terstruktur oleh masing-masing pihak dan kuantitas serta kualitas setiap kegiatan yang bisa dilihat/dihitung hasilnya (bersifat transparan).

#### 4. Harmonisasi

Persentase **baik** pada variabel harmonisasi sudah mulai berkurang jumlahnya hanya 66,67% dari responden yang mengkategorikannya. Hal ini dikarenakan sebagian besar stakeholder sudah tidak lagi mengetahui adanya bentuk integrasi hingga sampai pada tahap tersebut.

#### 5. Integrasi

Pada variabel integrasi persentase kategori **baik** tidak sebesar variabel-variabel sebelumnya karena hanya sebesar 66,67%. Bukti terpenuhinya indikator ini ialah dengan terbentuknya Kelompok Kerja Mangrove Kota Semarang (KKMKS).



Sumber: Hasil Olahan Kuesioner, 2013

**GAMBAR 2**  
**PERSENTASE KATEGORI SKOR VARIABEL**  
**KETERPADUAN**

*Catatan: Sebagian besar responden yang tidak menjawab dikarenakan bagian pertanyaan yang ditanyakan tidak pernah dilakukan sehingga mereka beranggapan tidak perlu memberi jawaban meskipun telah diberi pilihan tidak tahu (skor 1). Tidak memberi jawaban nilainya 0.*

Interaksi yang dilakukan oleh pihak Biota Foundation lebih banyak mengarah ke luar (stakeholder lain) untuk mendapatkan bantuan baik dari segi dana atau pun barang dibandingkan dengan interaksi yang masuk ke di kelompok tersebut. Berbeda dengan Biota Foundation, DKP Kota Semarang lebih banyak mengadakan interaksi ke dalam. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang mengajukan permintaan dana melalui pengajuan proposal yang dilakukan oleh pihak kelompok kerja atau pun pihak Kesemat. Bentuk interaksi keluar yang dilakukan DKP Kota Semarang ialah kerja sama, pengajuan proposal terhadap DKP Provinsi Jawa Tengah, dan pemberian bantuan. Pihak IWC sendiri lebih banyak mengadakan interaksi keluar melalui kegiatan pemberian bantuan berupa relawan ke ke kelompok kerja tertentu dan pengajuan proposal ke pihak Djarum Foundation.

Beberapa alasan adanya ketidakterpaduan stakeholder dalam melaksanakan kegiatan yang dilakukan di Mangunharjo seperti yang ditunjukkan oleh **GAMBAR 3** antara lain sebagai berikut:

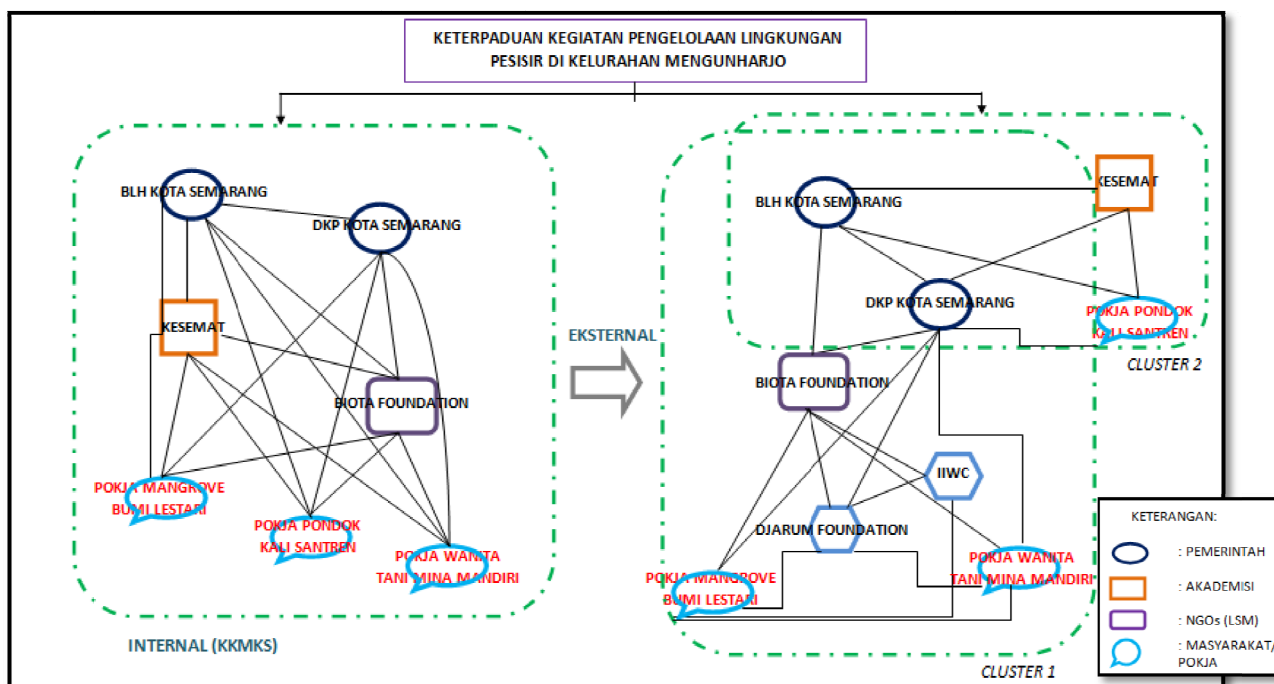
- Pecahnya kelompok kerja masyarakat di Mangunharjo khususnya dalam konservasi mangrove menjadi beberapa kelompok.
- Pihak IWC bekerja sama dengan kelompok Pak Sururi dan istrinya (Ibu Nurchayati) yang tergabung dalam LSM Biota Foundation. Selama melakukan kegiatan-kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir di daerah Mangkang tanpa melibatkan pihak pemerintah atau kelompok kerja lain.
- Pihak Kesemat juga memiliki partner yang berbeda dalam melakukan setiap aksi kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir di Mangunharjo.
- Terdapat adanya pengklusteran akibat alur kerja sama yang dilakukan. Pengklusteran ini terbentuk diluar KKMKS. Meskipun masing-masing pihak yang terlibat terintegrasi di dalam kelompok baru yaitu KKMKS namun di luar dari kelompok baru tersebut, masing-masing pihak mempunyai kelompok atau pihak tertentu dalam mengadakan kegiatan pengelolaan



lingkungan pesisir yang akan dilakukan di Mangunharjo.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis pembobotan menunjukkan bahwa kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir yang ada di Kelurahan Mangunharjo sudah baik dengan

persentase 73%. Namun dalam pelaksanaannya ditemukan bahwa terdapat pengelompokan kerja sama antarstakeholder. Alur kerja sama yang terjadi kemudian dibagi atas kondisi internal dan eksternal seperti yang ditunjukkan oleh gambar berikut ini:



Sumber: Analisis Penyusun, 2013

**GAMBAR 3**  
**DIAGRAM KETERPADUAN KEGIATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PESISIR DI KELURAHAN MANGUNHARJO**

**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**A. Kesimpulan**

- 1) Permasalahan lingkungan yang telah terjadi di Kelurahan Mangunharjo yaitu abrasi pantai, penurunan muka tanah serta banjir dan rob yang mengakibatkan menurunnya kualitas infrastruktur. Telah ada bentuk penanganan yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya yaitu pembuatan sabuk pantai (*sea wall*), penanaman dan pengelolaan mangrove serta pembuatan tanggul berupa karung pasir di Sungai Kali Beringin.
- 2) Kegiatan pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan di Mangunharjo melibatkan banyak stakeholder yang dibagi atas empat kelompok/strata dalam penelitian ini yaitu Kelompok pemerintahan, non pemerintahan,

- akademisi serta masyarakat (kelompok kerja). Belum terdapat pembagian kerja yang jelas berdasarkan fungsi masing-masing kelompok stakeholder.
- 3) Keterpaduan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir di Kelurahan Mangunharjo yang dianalisis berdasarkan pendekatan kuantitatif dengan analisis pembobotan dan pendekatan kualitatif menghasilkan bentuk keterpaduan yang berbeda. Pendekatan kuantitatif menemukan adanya keterpaduan yang sudah baik dalam hubungan internal (KKMKS) dan tambahan dengan pendekatan kualitatif menemukan adanya pengklusteran di luar dari KKMKS dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan (eksternal). Adanya kluster ini menunjukkan kurangnya keterpaduan antarstakeholder dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan

lingkungan kegiatan pesisir yang ada di Kelurahan Mangunharjo.

## B. Rekomendasi

- 1) Pemerintah sebagai regulator bertanggung jawab dalam memberikan strategi dan arahan kebijakan pengelolaan kawasan lingkungan secara tertulis sehingga masing-masing pihak yang memiliki kepentingan dalam pengelolaan pesisir mengetahui batasan-batasan yang harus dipatuhi dalam pelaksanaannya.
- 2) Pemerintah sebaiknya membagi-bagi kapling lahan/area yang akan dijadikan sebagai penanaman mangrove pada masing-masing pihak sehingga kapling yang sudah dibagi mejadi tanggung jawab pihak tertentu saja namun dimonitoring dan dievaluasi bersama dalam kurun waktu tertentu.
- 3) Penentuan sistem dan program kerja sesuai dengan arahan dan kebijakan dalam kegiatan pengelolaan lingkungan pesisir yang telah ditentukan disesuaikan dengan peran dari setiap stakeholder tersebut. Adanya sistem dan program kerja yang lebih terintegrasi mengakibatkan masing-masing stakeholder akan bekerja sesuai dengan arahan sistem kerja yang telah ditentukan tersebut.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. Per.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  
Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES)  
Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

## DAFTAR PUSTAKA

- Baker, Susan. 2006. *Sustainable Development*. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group
- Dahuri, Rokhmin, dkk. 1996. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: PT Pranadya Paramita
- Dunn-Rankin, Peter. 1983. *Scalling Methods*. London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers
- Kay, Robert dan Jackie Alder. 1999. *Coastal Planning and Management*. London: E & FN An Imprint of Routledge London and New York
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.10/MEN Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu